

ABSTRAK

Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh orang atau pejabat dalam organisasi pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan tertentu. Fokus Penelitian ini mengkaji implementasi pelaksanaan kepengurusan kepesertaan Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kelurahan Negeri Baru, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Kedua, apa saja kendala dalam implementasi pelaksanaan program Kartu Indonesia Sehat (KIS). Program ini dirancang untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Namun, dalam penerapannya, ditemukan berbagai tantangan seperti ketimpangan dalam distribusi, minimnya sosialisasi, serta keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Selain itu, kendala administratif seperti tidak lengkapnya dokumen kependudukan (KTP dan KK) turut menghambat proses pendistribusian KIS. Penelitian ini bertujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana implementasi Program KIS di Kelurahan Negeri Baru dan mengidentifikasi faktor – faktor pengambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penerikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa program KIS di Kelurahan Negeri Baru masih menghadapi beberapa masalah. Tidak efektifnya sosialisasi program menyebabkan masyarakat kurang memahami manfaat dan prosedur penggunaan KIS. Selain itu, ada ketidaktepatan dalam pendistribusian kartu, yang menyebabkan masyarakat kurang mampu masih belum menerima manfaat KIS. Faktor lain yang berpengaruh adalah birokrasi yang kompleks dan keterbatasan sumber daya manusia. Kesimpulan Penelitian ini adalah bahwa meskipun Program KIS bertujuan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin, pendistribusiannya masih belum optimal. Untuk menjadi lebih efisien dan tepat sasaran, diperlukan perbaikan pada mekanisme sosialisasi, pendataan yang lebih akurat, dan peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait.

Kata kunci : Implementasi, Kartu Indonesia Sehat

ABSTRACT

Policy implementation is an action taken by individuals or officials in government or private organizations to achieve certain goals. The focus of this research examines the implementation of the Indonesian Healthy Card (KIS) Program membership management in Negeri Baru Village, Bilah Hilir District, Labuhan Batu Regency, North Sumatra Province. Second, what are the obstacles in the implementation of the Indonesian Healthy Card (KIS) program? This program is designed to provide health protection for underprivileged communities. However, in its implementation, various challenges were found such as inequality in distribution, minimal socialization, and limited human resources and budget. In addition, administrative obstacles such as incomplete population documents (KTP and KK) also hampered the KIS distribution process. This study aims to analyze how the KIS Program is implemented in Negeri Baru Village and identify the inhibiting factors. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques in this study are observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques in this study are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the KIS program in Negeri Baru Village still faces several problems. Ineffective program socialization results in a lack of public understanding of the benefits and procedures for using KIS. Furthermore, there are inaccuracies in card distribution, resulting in underprivileged communities still not receiving KIS benefits. Other contributing factors are complex bureaucracy and limited human resources. The study concludes that although the KIS program aims to improve access to health services for the poor, its distribution is still suboptimal. To be more efficient and targeted, improvements to the socialization mechanism, more accurate data collection, and increased coordination between local governments and relevant agencies are needed.

Keywords : Implementation, Indonesia Health Card